

# P D R B

Produk Domestik Regional Bruto  
Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran

TRIWULAN II  
2021



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI ACEH**

<https://aceh.bps.go.id>

# P D R B

Produk Domestik Regional Bruto  
Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran

TRIWULAN II  
2021

<https://aceh.bps.go.id>



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

## PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

### TRIWULAN II TAHUN 2021

Katalog BPS : 9302020.11  
Nomor Publikasi : 11000.2135  
Nomor ISSN : 2502.0889  
Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm  
Jumlah Halaman : ix + 53 Halaman

Penanggung Jawab/Pengarah : Ihsanurijal  
Editor : Tasdik Ilhamudin, Maulana MS Aji  
Penulis : Afrizah  
Pengolah Data & Grafik : Afrizah  
Penyunting dan Finalisasi : Maulana MS Aji  
Cover : Afrizah  
Infografis 1 : Cahya Danu Rahman  
Infografis 2 dan 3 : Afrizah

#### **Diterbitkan Oleh :**

© BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

## KATA PENGANTAR


Salah satu parameter yang digunakan untuk melihat gambaran kinerja perekonomian secara makro suatu wilayah dalam periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB dilihat dari sisi pengeluaran dapat menggambarkan konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, investasi dan neraca perdagangan.

Untuk itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh menerbitkan publikasi Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2021 dalam rangka mendiseminasikan kajian tentang gambaran kinerja perekonomian secara lebih dini dan lengkap pada periode tersebut.

Perlu disampaikan bahwa angka-angka yang terdapat pada publikasi ini masih bersifat angka sementara dan akan dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, semoga publikasi ini dapat bermanfaat.

Banda Aceh, September 2021  
Kepala BPS Provinsi Aceh



Ihsanurrijal

<https://aceh.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Gambar dan Tabel .....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
Infografis 1.....	ix
1. Pendahuluan .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga .....	4
1.2.2 Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga....	5
1.2.3 Konsumsi Pemerintah .....	6
1.2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto .....	7
1.2.5 Perubahan Inventori.....	9
1.2.6 Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri .....	10
1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri .....	10
1.2.8 Net Ekspor Antardaerah.....	10
1.3 Indikator Ekonomi <i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> .....	11
Infografis 2.....	15
II. Tinjauan PDRB Provinsi Aceh .....	19
2.1 Nilai PDRB Total dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh.	19
2.2 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran.....	20
III. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran .....	25
3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> .....	25
3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> .....	27
3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera .....	29
Infografis 3.....	33

IV. Analisis ICOR.....	37
Lampiran .....	39
Daftar Pustaka.....	51

<https://aceh.bps.go.id>



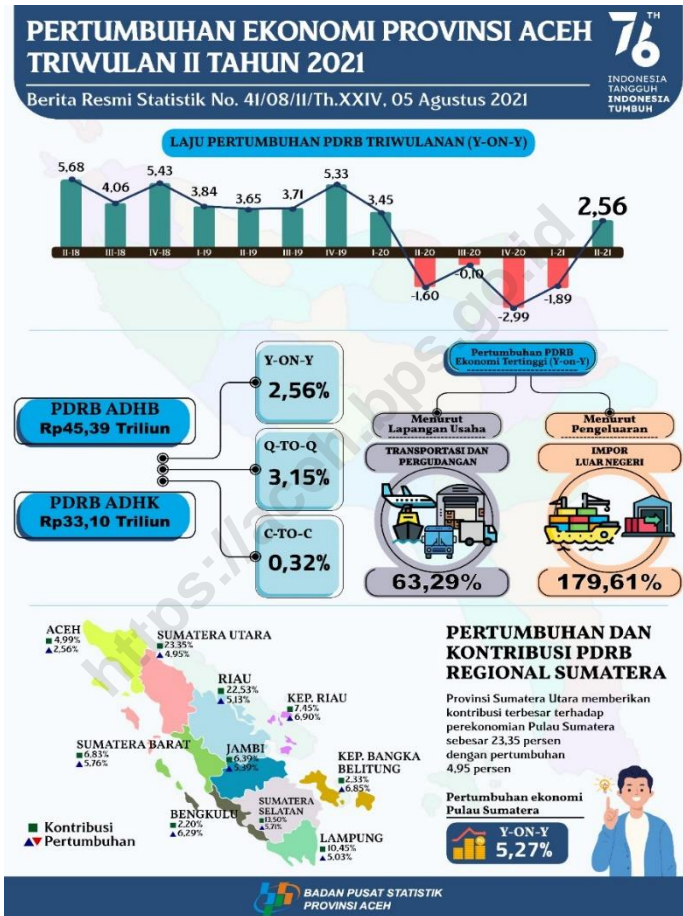
## DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

	Halaman
Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 (Triliun Rupiah) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen) .....	17
Gambar 2. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan II Tahun 2021 (Triliun Rupiah) .....	21
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi <i>y-on-y</i> dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2021 (persen) .....	25
Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>y-on-y</i> (Persen) .....	27
Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh <i>q-to-q</i> (Persen) .....	28
Gambar 6. Pertumbuhan PDRB ( <i>y-on-y</i> ) Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 (Persen) .....	29
Gambar 7. Pertumbuhan PDRB ( <i>y-on-y</i> ) Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2020 (Persen) .....	30
Gambar 8. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 (Persen) .....	31
Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB ( <i>q-to-q</i> ) Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 (persen) .....	32
Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB ( <i>c-to-c</i> ) Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 (persen) .....	32
Gambar 11. <i>ICOR</i> dan Laju Pertumbuhan Ekonomi ( <i>y-on-y</i> ) Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2016-2021 .....	37
Gambar 12. Perbandingan <i>ICOR</i> Aceh dan Indonesia Triwulan II Tahun 2016-2021 .....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 (Triliun Rupiah).....	41
Lampiran 2. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 (Triliun Rupiah).....	42
Lampiran 3. Laju Pertumbuhan <i>c-to-c</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 (Persen).....	43
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 (Persen).....	44
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan <i>q-to-q</i> PDRB Provinsi Aceh Atas Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 (Persen).....	45
Lampiran 6. Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100) Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 .....	46
Lampiran 7. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 (Persen).....	47
Lampiran 8. Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 .....	48
Lampiran 9. Sumber Pertumbuhan <i>y-on-y</i> PDRB Menurut Pengeluaran Triwulanan 2020 sampai Triwulan II 2021 (Persen).....	49
Lampiran 10. Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan II 2021 .....	50

Infografis 1.





# *PENDAHULUAN*

<https://aceh.bps.go.id>



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Informasi perkembangan perekonomian sangat diperlukan untuk menyusun perencanaan dan melakukan evaluasi kinerja pemerintahan. Salah satu data statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan perencanaan dan evaluasi ekonomi makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan tersedianya data PDRB, strategi dan kebijakan pembangunan perekonomian yang telah diambil pemerintah dapat dievaluasi, dan diperbaiki atau dilanjutkan di masa mendatang.

Hakekat pembangunan ekonomi adalah serangkaian kegiatan usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk:

- a. Peningkatan taraf hidup masyarakat.
- b. Perluasan kesempatan kerja.
- c. Pemerataan pembagian pendapatan masyarakat.
- d. Peningkatan hubungan ekonomi regional.
- e. Pergeseran ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan pendapatan masyarakat naik dengan distribusi yang semakin merata. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah perlu disajikan pendapatan regional secara berkala yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional/daerah khususnya di bidang ekonomi.

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor permintaan daripada penyediaan (Sukimo, 2006). Perkembangan yang terjadi sebagai akibat dari perubahan gaya hidup dan perilaku konsumsi dari sebagian masyarakat modern telah mendorong produsen untuk meningkatkan produknya baik secara kuantitas maupun kualitas, yang pada akhirnya mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dibutuhkan parameter untuk memantau perkembangan permintaan atau konsumsi masyarakat luas yaitu dengan melihat perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran.

Penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mulai triwulan IV tahun 2014 telah menggunakan tahun dasar baru 2010 berbasis SNA 2008, dimana sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000.

Perubahan tahun dasar ini perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Perubahan tersebut seperti peningkatan penggunaan teknologi dan perkembangan jenis pekerjaan.

## 1.2 Ruang Lingkup

### 1.2.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran rumah tangga atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi, termasuk barang/ jasa yang dibarter, diterima dalam bentuk natural, atau diproduksi sendiri. Barang dan jasa yang dimaksud antara lain :

1. Segala jenis bahan makanan dan minuman baik mentah maupun bahan jadi, termasuk minuman beralkohol, tembakau dan rokok.
2. Perumahan berikut fasilitas perumahan seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telpon, listrik dan air. Termasuk juga pengeluaran untuk imputasi sewa rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*). Sedangkan pembelian rumah tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga.
3. Segala jenis bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama seperti mobil, motor, kulkas, meubel, TV, alat-alat dapur, mainan anak, alat-alat olahraga, binatang peliharaan, dan barang tahan lama lainnya.
5. Barang lainnya seperti bahan-bahan untuk kebersihan (sabun mandi, sampo dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, lulur, bedak, lipstik dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar, kertas pembersih dan sebagainya.

Jasa-jasa seperti jasa kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi dan sejenisnya), jasa pendidikan (biaya sekolah, kursus dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, tiket bioskop, tiket tempat rekreasi, biaya pembantu rumah tangga, tukang kebun, *baby sitter* dan jasa lainnya.

Pada tahun dasar baru 2010, konsumsi rumah tangga tidak termasuk pembelian dengan motif *store of value* (emas perhiasan, barang koleksi seperti lukisan, barang antik, dsj), perbaikan kecil rumah tinggal, dan konsumsi LNPRT, karena konsumsi LNPRT sudah menjadi komponen tersendiri. Untuk memperkirakan besarnya konsumsi rumah



tangga, digunakan hasil Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga Triwulanan (SKKRT) sebagai data pokok. Selanjutnya penyempurnaan estimasi dilakukan melalui proses rekonsiliasi.

Perkiraan besarnya konsumsi rumahtangga triwulanan didasarkan pada data SKKRT, penduduk pertengahan tahun, serta Indeks Harga Konsumen (IHK). Untuk perkiraan konsumsi pada tahun dimana data belum tersedia digunakan model elastisitas pendapatan terhadap perubahan permintaan barang-barang konsumsi.

### **1.2.2. Konsumsi Lembaga Nonprofit Yang Melayani Rumah Tangga**

Pengeluaran lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, telex, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya.
- c. Penyusutan.
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh : PBB, STNK, BBN, dll.

Jenis lembaga yang termasuk LNPRT yaitu :

1. Organisasi kemasyarakatan (Ormas),
2. Organisasi sosial (Orsos),
3. Organisasi profesi (Orprof) dan serikat buruh,
4. Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi,
5. Partai Politik,
6. Lembaga keagamaan,

Sedangkan kegiatan utama yang dilakukan oleh LNPRT berdasarkan tujuan utamanya dibedakan menjadi 9, yaitu :

1. Perumahan,
2. Kesehatan,

3. Rekreasi, kebudayaan, dan olahraga,
4. Pendidikan,
5. Perlindungan/jaminan sosial,
6. Keagamaan,
7. Partai politik, organisasi buruh dan organisasi profesi,
8. Lingkungan hidup,
9. Jasa lainnya.

Perkiraan besarnya konsumsi LNPRT didasarkan pada data Survei Khusus Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga Triwulanan, selain data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.

### 1.2.3. Konsumsi Pemerintah

Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas produksi maupun aktivitas investasi. Adapun pada sektor pemerintah, besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan output pemerintah, sehingga PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, serta perkiraan penyusutan barang modal, dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan. Kegiatan *social transfer in kind purchased market production* juga masuk ke dalam PKP. Definisi ini sejalan dengan definisi dalam SNA 2008, yang menyebutkan bahwa pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ekuivalen dengan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah untuk dikonsumsi sendiri. Seluruh pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara, dalam PDRB seri baru ini PKP diklasifikasikan berdasarkan pengeluaran pemerintah kolektif dan individu.

Adapun sumber data yang dipakai untuk memperkirakan besarnya PKP adalah data APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dari kementerian keuangan, APBA (Anggaran Pendapatan Belanja Aceh) dari Dinas Pengelolaan Keuangan Provinsi Aceh,

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dari Dinas Keuangan Kabupaten/Kota, dan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dari Desa hasil Survei K3.

#### 1.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nopirin (2000) menjelaskan, investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam PDB. Pengertian investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor, dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 2004). Menurut Tambunan (2001), di dalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaannya, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal/kapital tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Investasi dapat dibedakan antara investasi bruto (pembentukan modal tetap domestik bruto) dan investasi netto (pembentukan modal tetap domestik netto).

Menurut definisi dari BPS, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pembuatan dan pembelian barang-barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Barang modal juga diartikan sebagai barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Barang yang tidak diproduksi kembali, seperti tanah dan cadangan mineral, tidak termasuk dalam pembentukan modal tetap bruto. Pembentukan modal tetap bruto mencakup:

1. Pembentukan modal tetap berupa bangunan atau konstruksi terdiri dari :
  - a. Bangunan tempat tinggal,
  - b. Bangunan bukan tempat tinggal,
  - c. Bangunan atau konstruksi lainnya seperti; jalan, monumen, jembatan, irigasi, pembangkit tenaga listrik dan jaringannya, instalasi telekomunikasi, pemancar TV, pelabuhan, terminal, jaringan pipa untuk minyak, gas dan air.
  - d. Perbaikan besar-besaran dari bangunan tersebut di atas.

Pembentukan modal berupa bangunan/konstruksi dinilai sesuai dengan output bangunan yaitu nilai seluruh pekerjaan bangunan pada satu tahun tertentu tanpa memperhatikan bangunan tersebut sudah selesai atau belum.

2. Pembentukan modal tetap non bangunan berupa mesin dan alat perlengkapan terdiri dari :

- a. Alat-alat transportasi, seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, truk, motor, dan lain-lain,
- b. Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pertanian,
- c. Mesin-mesin dan alat perlengkapan untuk industri, listrik dan pertambangan, mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan untuk pembuatan jalan, jembatan dan lain-lain,
- d. Mesin-mesin dan perabot untuk perlengkapan kantor, toko, hotel, restoran, rumah dan lain-lain.

Mesin-mesin dan alat-alat perlengkapan yang sedang dalam proses pembuatan tidak dimasukkan dalam perhitungan pembentukan modal tetap bruto, tetapi merupakan stok dari produsennya.

3. Budidaya sumber daya hayati.

4. Produk kekayaan intelektual meliputi : *research and development*, eksplorasi dan evaluasi mineral, perangkat lunak komputer dan *database*, karya hiburan, tulisan, dan seni, produk kekayaan intelektual lainnya.

5. Sistem persenjataan.

6. Perluasan perkebunan dan penanaman baru untuk tanaman keras. Yang dimaksud dengan tanaman keras adalah tanaman yang hasilnya baru akan diperoleh setelah berumur satu tahun atau lebih. Termasuk juga pengeluaran yang dilakukan oleh perkebunan besar selama perkebunan itu belum mendatangkan hasil (berproduksi) dan kegiatan penanaman kembali (reboisasi) yang dilakukan oleh perusahaan pemerintah dan oleh pemerintah sendiri.

7. Penambahan ternak yang khusus dipelihara untuk diambil susu dan bulunya atau untuk dipakai tenaganya dan sebagainya, kecuali ternak yang dipelihara untuk dipotong.

8. Margin pedagang atau makelar jasa pelayanan dan ongkos pemindahan hak milik dalam transaksi jual beli tanah, sumber mineral, hak pengusaha hutan, hak paten, hak cipta dan barang modal bekas.

9. Barang modal lainnya.

Adapun sumber data dalam memperkirakan nilai PMTB adalah terdiri dari data realisasi investasi dari DPMPSTP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), data impor mesin HS 2 digit, serta dari fenomena dan sumber lainnya.

### 1.2.5. Perubahan Inventori

Inventori merupakan persediaan barang pada unit institusi, yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, atau belum selesai diproduksi, atau belum selesai diproses, atau belum terjual. Sedangkan perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (tanda negatif).

Pada prinsipnya inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi baik untuk keperluan produksi maupun konsumsi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi baik sebagai input antara atau konsumsi akhir. Klasifikasi inventori menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi.
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau penyediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi.
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli.
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual.
- f. Ternak untuk tujuan dipotong.
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan.

h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, pula pasir, dan gandum.

### **1.2.6. Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri**

Ekspor barang dan jasa luar negeri merupakan nilai transaksi pemindahan kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara residen suatu negara dengan non-residen (dalam harga *free on board* atau f.o.b). Nilai ekspor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction* dan *direct purchase non-resident* di Indonesia. Sedangkan ekspor jasa mencakup dua belas sektor jasa (BOP Manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan diantaranya adalah Statistik Ekspor, Statistik Pariwisata, Statistik *Inbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

### **1.2.7 Impor Barang dan Jasa Luar Negeri**

Impor barang luar negeri merupakan nilai transaksi ekonomi (pembelian, barter, *gifts/grants*) dalam bentuk barang antara non-residen dan residen suatu negara. Sedangkan impor jasa luar negeri merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk jasa antara non-residen dengan residen suatu negara. Impor barang luar negeri mencakup *un-recorded transaction*, *direct purchase* penduduk Indonesia di luar negeri, impor sewa beli dan kawasan berikat nasional (KBN). Sedangkan untuk impor jasa luar negeri mencakup dua belas sektor jasa (BOP manual 6 sama dengan SNA 2008). Sumber data yang digunakan terdiri dari Statistik Impor, Statistik Pariwisata, Statistik *Outbound* dan Neraca Pembayaran Indonesia.

### **1.2.8 Net Ekspor Antardaerah**

Nilai net ekspor antardaerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antardaerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah. Adapun perkiraan nilai net ekspor antardaerah saat ini menggunakan metode *Cross Houling*.

### 1.3 Indikator Ekonomi *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Dalam teori ekonomi, investasi merupakan salah satu faktor produksi yang penting, di samping faktor produksi sumber daya manusia, dalam proses pembangunan ekonomi suatu wilayah karena investasi berpotensi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan kapasitas produksi yang meningkat, yaitu misalnya karena investasi digunakan untuk membeli atau menambah barang-barang modal seperti mesin-mesin dan peralatannya, maka hasil-hasil produksi di wilayah tersebut diharapkan juga akan meningkat (Mankiw, 2001).

Ukuran kebutuhan investasi yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi suatu target pendapatan wilayah atau laju pertumbuhan ekonomi tertentu diberikan oleh suatu ukuran atau indikator ekonomi yang disebut sebagai *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*. Dengan *ICOR*, perkiraan kebutuhan investasi dapat diperkirakan untuk mencapai suatu tingkat kinerja ekonomi yang ditetapkan karena *ICOR* merupakan ukuran atau indikator makro yang menghubungkan antara investasi dengan pendapatan wilayah.

Salah satu komponen PDRB menurut pengeluaran yaitu pembentukan modal tetap bruto (PMTB). PMTB menjelaskan besarnya realisasi investasi fisik yang telah dilakukan, investasi fisik terdiri dari investasi yang dilakukan untuk membeli atau menambah atau memperbaiki barang-barang modal seperti bangunan (tempat tinggal dan bukan tempat tinggal), mesin-mesin dan peralatannya, kendaraan, dan melakukan pekerjaan investasi fisik lainnya seperti reklamasi lahan, pemerataan lahan untuk kantor, dan sebagainya.

Nuryadin dan Sodik (2012) dalam jurnal *Penyusunan Indikator Ekonomi Incremental Capital Output Ratio 2011*, secara matematis rumus yang digunakan untuk menghitung *ICOR* adalah :

$$ICOR = \frac{\Delta k}{\Delta Y} \dots\dots\dots(1)$$

dimana:

$\Delta k$  adalah investasi, atau barang modal baru, penambahan kapasitas terpasang

$\Delta Y$  adalah pertambahan/pertumbuhan *output*

Dalam praktik, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, melainkan besarnya investasi yang ditanamkan baik oleh Pemerintah maupun Swasta. Sehingga dengan mengasumsikan  $\Delta k = I$  ( $I$  = investasi), begitu juga dengan *output* yang diasumsikan sebagai nilai PDRB karena keterbatasan data nilai antara, maka rumus (1) dapat dimodifikasi menjadi:

$$ICOR = \frac{I}{\Delta Y} \dots\dots\dots(2)$$

Rumus (2) ini disebut dengan *Gross ICOR*. Dalam penerapannya rumus *Gross ICOR* ini lebih sering dipakai, karena data yang digunakan tersedia relatif lebih lengkap. Dalam beberapa hal, untuk kasus-kasus tertentu investasi yang ditanamkan pada suatu tahun akan langsung menghasilkan tambahan *output* pada tahun itu juga, sehingga rumus (2) di atas dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{I_t}{(Y_t - Y_{t-1})} \dots\dots\dots(3)$$

dimana:

$I_t$  adalah investasi pada tahun ke- $t$ ; (dalam hal ini adalah PMTB tahun ke- $t$ )

$Y_t$  adalah *output* pada tahun ke- $t$ ; (PDRB menurut pengeluaran tahun ke- $t$ )

$Y_{t-1}$  adalah *output* pada tahun ke-  $t-1$ ; (PDRB menurut pengeluaran tahun  $t-1$ )

Rumus (3) di atas dapat diartikan bahwa investasi yang ditanamkan pada tahun ke  $t$  akan menimbulkan *output* (dalam hal ini PDRB) pada tahun  $t$  itu juga.

Koefisien *ICOR* negatif dapat terjadi jika *output* pada suatu waktu tertentu lebih kecil dari pada tahun sebelumnya. Penurunan *output* terjadi jika ada sebagian barang modal dijual, rusak atau tidak diaktifkan karena alasan tertentu. Walaupun mungkin ada penambahan barang modal baru, tetapi sementara itu barang modal baru tersebut belum berproduksi atau telah berproduksi tetapi *output* yang dihasilkan relatif sangat kecil dibandingkan dengan *output* tahun sebelumnya. Sehingga selisih *output* antara tahun ditanamkannya investasi dengan tahun sebelumnya bernilai negatif. Pada gilirannya koefisien *ICOR*-pun menjadi negatif. Dengan demikian penanaman barang modal baru belum menghasilkan *output* secara optimal, atau bisa dikatakan investasi yang ditanamkan belum/tidak efisien pada saat itu. Tetapi apabila ada penambahan/penggantian barang modal, maka tidak bisa dikatakan bahwa telah terjadi *inefficiency*. Namun demikian secara makro keadaan yang disebutkan terakhir ini jarang



terjadi. Koefisien ICOR yang relatif besar terjadi jika investasi yang ditanamkan pada tahun tertentu relatif besar, sedangkan *output* yang dihasilkan lebih besar tetapi hampir sama dengan *output* pada tahun sebelumnya, atau tambahan *output* yang dihasilkan relatif kecil. Dengan kata lain investasi yang ditanamkan pada tahun itu belum efektif sehingga tidak efisien dan menghasilkan koefisien ICOR yang relatif besar. Widodo dalam (Situmorang, 2011) menyatakan bahwa secara umum, nilai ICOR yang menunjukkan produktivitas investasi yang baik antara 3–4.

Penghitungan *ICOR* dapat dilakukan dengan metode akumulasi yaitu berdasarkan suatu anggapan bahwa timbulnya kenaikan *output* selama periode waktu *t* disebabkan karena adanya akumulasi investasi selama periode waktu *t*. Perumusan *ICOR* dengan metode ini adalah rasio antara akumulasi investasi terhadap akumulasi peningkatan *output* selama periode waktu *t* sampai *t<sub>n</sub>* yang secara matematis dituliskan sebagai berikut :

$$ICOR = \frac{\sum I_t}{\sum (Y_t - Y_{t-1})} \dots \dots \dots (5)$$

Kelebihan dari metode akumulasi adalah dalam penerapannya metode ini terkandung prinsip rata-rata tertimbang. Dengan digunakannya rata-rata tertimbang, maka koefisien *ICOR* ekstrim yang terjadi pada tahun-tahun tertentu bisa dihindari. Akan tetapi metode akumulasi ini tidak memperhitungkan kapasitas terpasang yang berlebih dan tidak dimanfaatkan secara penuh. Dengan kata lain, metode akumulasi tidak bisa mencerminkan *inefficiency* yang memang terjadi dalam praktek.

Walaupun pertambahan *output* sebenarnya bukan hanya disebabkan oleh investasi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain di luar investasi, dalam penghitungan *ICOR* ini digunakan asumsi bahwa tidak ada faktor lain yang mempengaruhi *output* selain investasi, dengan kata lain faktor-faktor lain di luar investasi dianggap konstan. Penghitungan *ICOR* dalam publikasi ini dilihat pada kondisi triwulan II periode tahun 2016-2021 menggunakan metode akumulasi yaitu rumus (5), sementara untuk *ICOR* triwulan II setiap tahunnya menggunakan metode standar rumus (3).

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<https://aceh.bps.go.id>

Infografis 2.





<https://aceh.bps.go.id>

# *TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH*

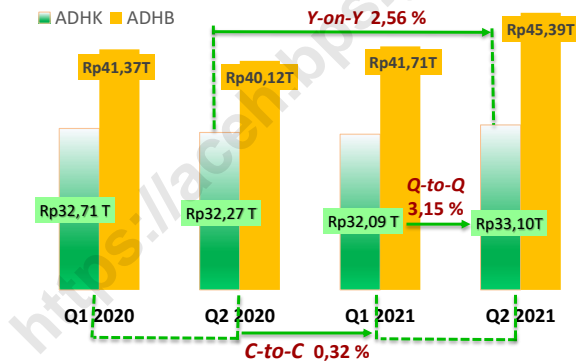
<http://www.bps.go.id>



## II. TINJAUAN PDRB PROVINSI ACEH

### 2.1 Nilai PDRB Total dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh

Pada Gambar 1 sekilas dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) pada umumnya selalu lebih tinggi daripada nilai PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan). Perbedaan antara nilai PDRB ADHB dengan ADHK ini disebabkan karena penghitungan PDRB ADHB dipengaruhi oleh perubahan harga pada setiap tahunnya, sedangkan penghitungan PDRB ADHK tidak dipengaruhi oleh perubahan harga karena hanya melihat pengaruh harga pada tahun dasar yaitu tahun 2010.



**Gambar 1. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 (Triliun Rupiah) serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh (Persen)**

Tinjauan perkembangan PDRB secara tahunan (*y-on-y*) triwulan II tahun 2021 menggambarkan perkembangan PDRB ADHK 2010 pada triwulan II tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020. Perekonomian Aceh secara *y-on-y* pada triwulan II tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,56 persen, dengan nilai PDRB ADHK sebesar 33,10 triliun rupiah meningkat sekitar 825,4 milyar rupiah PDRB ADHK dibandingkan pada triwulan II tahun 2020 yang hanya mencapai 32,27 triliun rupiah. Nilai PDRB ADHB pada triwulan II tahun 2021 diperoleh sebesar 45,39 triliun rupiah juga

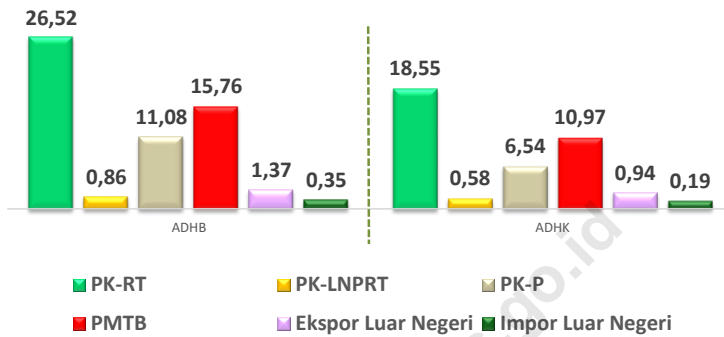
mengalami peningkatan dibandingkan pada triwulan II tahun 2020 yang hanya mencapai 40,12 triliun rupiah, hal ini berarti mengalami peningkatan sekitar 5,28 triliun rupiah.

Tinjauan ekonomi Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) triwulan II tahun 2021 yaitu nilai PDRB ADHK 2010 pada triwulan II tahun 2021 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2021. Ekonomi Aceh juga mengalami pertumbuhan yaitu sekitar 3,15 persen. Hal ini didukung oleh peningkatan nilai PDRB ADHK sebesar 1,01 triliun rupiah pada triwulan II tahun 2021 dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK pada triwulan I tahun 2021 yang hanya mencapai 32,09 triliun rupiah. Nilai PDRB ADHB meningkat sebesar 3,69 triliun rupiah pada triwulan II tahun 2021 dibandingkan pada triwulan I tahun 2021 yang hanya mencapai 41,71 triliun rupiah.

Jika dilihat perkembangan ekonomi Provinsi Aceh pada triwulan II tahun 2021 secara kumulatif yaitu perbandingan dari triwulan I sampai II tahun 2021 dengan nilai PDRB ADHK triwulan I sampai II tahun 2020, maka diperoleh persentase pertumbuhan sebesar 0,32 persen. Adapun nilai PDRB ADHK kumulatif triwulan II tahun 2021 diperoleh sebesar 65,19 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 206,7 milyar rupiah dibandingkan dengan nilai PDRB ADHK kumulatif triwulan II tahun 2020 yang hanya mencapai sebesar 64,98 triliun rupiah.

## **2.2 Nilai PDRB Menurut Pengeluaran**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa komponen PDRB menurut pengeluaran terdiri dari beberapa komponen. Pada triwulan II tahun 2021, nilai PDRB komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) merupakan komponen yang paling mendominasi, baik secara ADHB maupun ADHK 2010, masing-masing sebesar 26,52 triliun rupiah dan 18,55 triliun rupiah. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan nilai PDRB kedua terbesar setelah komponen PKRT, yaitu secara ADHB sebesar 15,76 triliun rupiah dan ADHK 2010 sebesar 10,97 triliun rupiah. Selanjutnya nilai komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) ADHB sebesar 11,08 triliun rupiah dan nilai ADHK sebesar 6,54 triliun rupiah.



**Gambar 2. Nilai PDRB ADHB dan ADHK 2010 Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan II Tahun 2021 (Triliun Rupiah)**

Sementara itu, nilai ADHB komponen lainnya, seperti komponen pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT), komponen ekspor luar negeri, dan komponen impor luar negeri mempunyai nilai dibawah 2 triliun rupiah, masing-masing sekitar 0,86 triliun rupiah, 1,37 triliun rupiah, dan 0,35 triliun rupiah. Begitu juga dengan ADHK 2010, nilai komponen lainnya juga dibawah 2 triliun rupiah, yaitu komponen pengeluaran Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 0,58 triliun rupiah, komponen ekspor luar negeri sebesar 0,94 triliun rupiah, dan komponen impor luar negeri sebesar 0,19 triliun rupiah.



<https://aceh.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

# ***PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN***

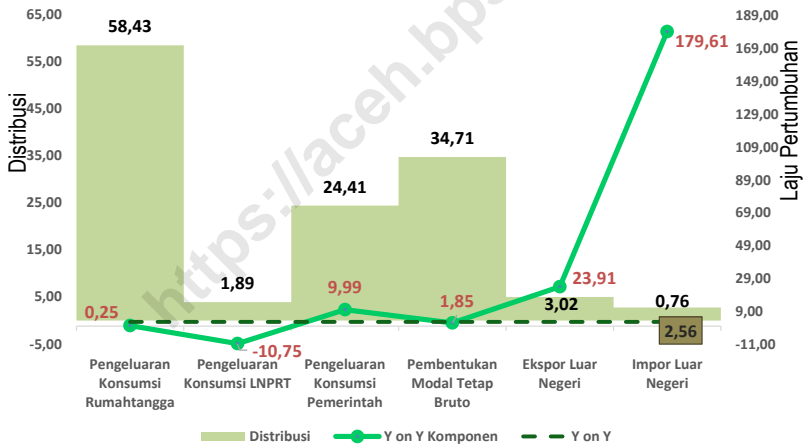
<https://aceh.sbps.go.id>



### III. PDRB PROVINSI ACEH MENURUT PENGELUARAN

#### 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y*

Perekonomian ekonomi Aceh secara *y-on-y* mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 2,56 persen. Berdasarkan PDRB pengeluaran, pertumbuhan terjadi hampir pada semua komponen pengeluaran, kecuali pada komponen pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) yaitu mengalami penurunan sebesar 10,75 persen. Hal ini dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan partai politik pada triwulan ini, dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020.



**Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi *y-on-y* dan Distribusi Menurut Pengeluaran Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2021 (Persen)**

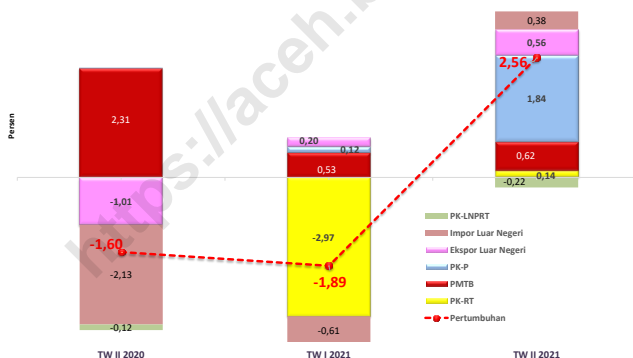
Komponen impor luar negeri mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu mencapai 179,61 persen terutama disebabkan oleh sub-komponen impor barang yang mengalami kenaikan akibat adanya kegiatan impor barang khususnya pada komoditas mesin/pesawat mekanik. Disisi lain, sub-komponen impor jasa mengalami penurunan salah satunya disebabkan karena tidak tercatat adanya wisatawan mancanegara yang

masuk ke Provinsi Aceh. Namun demikian, komponen impor luar negeri merupakan komponen yang menjadi faktor pengurang terhadap PDRB total. Jika dilihat secara distribusi pertumbuhan ekonomi, maka komponen impor luar negeri memberikan peranan sebesar 0,76 persen dan merupakan peranan yang sangat rendah dibandingkan dengan komponen lain (Gambar 3).

Selanjutnya, komponen ekspor luar negeri merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi yaitu mencapai 23,91 persen. Kegiatan ekspor yang mengalami peningkatan terutama pada komoditas bahan bakar mineral dan kopi yang mengalami kenaikan dibandingkan pada triwulan II tahun 2020. Secara distribusi pertumbuhan ekonomi, komponen ekspor luar negeri memberikan peranan yang kecil yaitu sebesar 3,02 persen. Pertumbuhan ekonomi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan ketiga tertinggi yaitu mencapai 9,99 persen. Kenaikan terutama disebabkan adanya kenaikan belanja pegawai akibat adanya realisasi gaji-14. Komponen ini juga memberikan peranan ketiga tertinggi pada pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 24,41 persen.

Komponen yang mengalami pertumbuhan berikutnya adalah komponen PMTB yaitu sebesar 1,85 persen. Pertumbuhan terutama didorong oleh sub-komponen PMTB non-bangunan. Komponen ini memberikan peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu menduduki peranan kedua terbesar, dengan peranan sebesar 34,71 persen. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 0,25 persen, pertumbuhan terutama didorong oleh pertumbuhan pada sub-komponen kesehatan, transportasi, dan penginapan. Belanja untuk menunjang kesehatan masih tetap menjadi prioritas konsumsi masyarakat, selain itu pembatasan perjalanan dalam maupun luar kota tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas transportasi/angkutan lainnya. Sementara itu, hotel maupun tempat penginapan sudah mulai terlihat adanya aktivitas dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan peranan yang paling besar pada PDRB Provinsi Aceh yaitu mencapai 58,43 persen.

Berdasarkan sumbernya, pada triwulan II-2021 sumber pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan sumber terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi secara total, yaitu mencapai 1,84 persen, selanjutnya diikuti oleh komponen PMTB yaitu sebesar 0,62 persen. Sumber pertumbuhan komponen ekspor luar negeri sebesar 0,56 persen, dan merupakan sumber pertumbuhan terbesar ketiga. Adapun sumber pertumbuhan komponen impor luar negeri sebagai komponen pengurang pada PDRB menyumbang sebesar 0,38 persen. Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,14 persen pada pertumbuhan ekonomi total. Pada pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2021, sumber pertumbuhan negatif didapatkan dari komponen LNPRT yaitu sebesar 0,22 persen (Gambar 4).

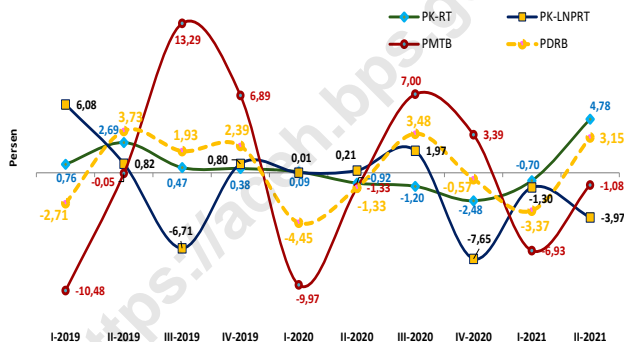


**Gambar 4. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *y-on-y* (Persen)**

### 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh *q-to-q*

Perekonomian Aceh pada triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan yaitu sebesar 3,15 persen dibandingkan triwulan I-2021. Pertumbuhan terjadi pada beberapa komponen, kecuali komponen pengeluaran konsumsi LNPRT, komponen PMTB, dan komponen ekspor luar negeri yaitu mengalami penurunan pertumbuhan masing-masing

sebesar 3,97 persen, 1,08 persen, dan 32,48 persen. Penurunan yang terjadi pada komponen konsumsi LNPRT dipengaruhi oleh berkurangnya kegiatan partai politik serta berkurangnya penyaluran bantuan kemanusiaan oleh beberapa lembaga kepada masyarakat dibandingkan pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, penurunan pada komponen PMTB terutama disebabkan oleh penurunan pada sub-komponen PMTB bangunan. Pada triwulan II-2021, terjadi penurunan jumlah pengiriman barang ekspor ke luar negeri terutama pada komoditas kopi dan bahan bakar mineral dibandingkan pada triwulan I-2021.



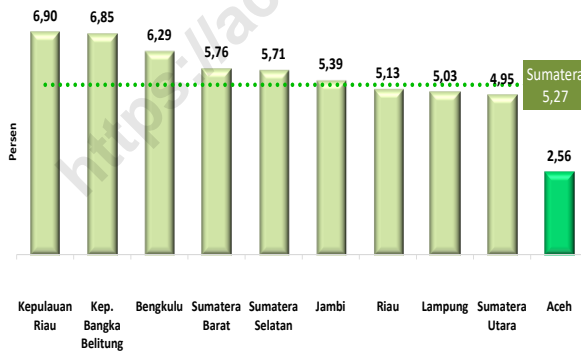
**Gambar 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh q-to-q (Persen)**

Adapun komponen yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah terjadi pada komponen impor luar negeri yaitu mencapai 170,05 persen, hal ini didorong oleh pertumbuhan pada sub-komponen impor barang terutama pada komoditas mesin/pesawat mekanik. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi kedua terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu mencapai 99,37 persen. Pertumbuhan terutama disebabkan oleh realisasi belanja gaji-14 oleh pemerintah. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu mencapai 4,78 persen. Pertumbuhan paling

tinggi terjadi pada sub-komponen pakaian, hal ini disebabkan karena masyarakat banyak membeli pakaian bertepatan dengan hari raya Idul Fitri 1442 H (Gambar 5).

### 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera

Pertumbuhan ekonomi di wilayah regional Sumatera pada triwulan II 2021 secara tahunan (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 5,27 persen dibanding dengan triwulan II 2020. Pertumbuhan terjadi pada semua provinsi di wilayah Sumatera, pertumbuhan tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sekitar 6,90, selanjutnya diikuti oleh Provinsi Bangka Belitung yaitu 6,85 persen, dan Provinsi Bengkulu sekitar 6,29 persen. Selanjutnya terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki pertumbuhan di antara 5-6 persen. Provinsi Aceh sendiri mengalami pertumbuhan sekitar 2,56 persen, dan Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan Aceh mencapai pertumbuhan sekitar 4,95 persen (Gambar 6).

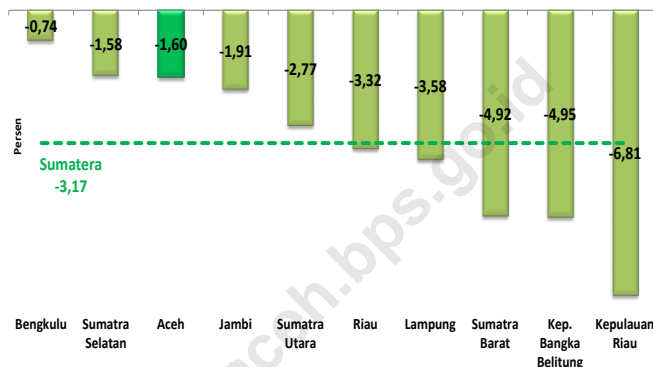


**Gambar 6. Pertumbuhan PDRB (*y-on-y*) Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 (Persen)**

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 secara *y-on-y* sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2020, selain disebabkan oleh beberapa pengaruh ekonomi lainnya. Dapat dilihat bahwa beberapa provinsi yang mengalami penurunan ekonomi jauh menurun pada triwulan II tahun 2020, justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang drastis pada triwulan II tahun 2021, kondisi ini

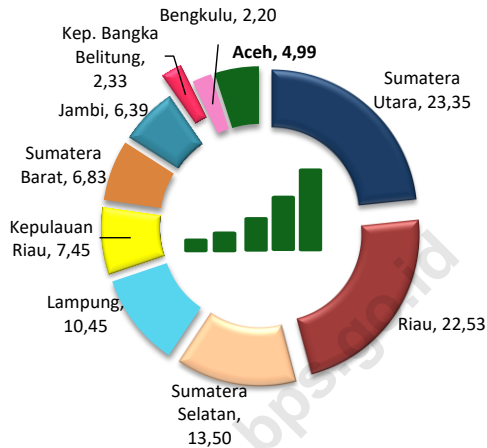


biasa disebut *lower base effect*. Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan II tahun 2020 sempat mengalami penurunan ekonomi yang paling jauh menurun, sedangkan kondisi pada triwulan II tahun 2021 menjadi provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi di wilayah regional Sumatera (Gambar 7).



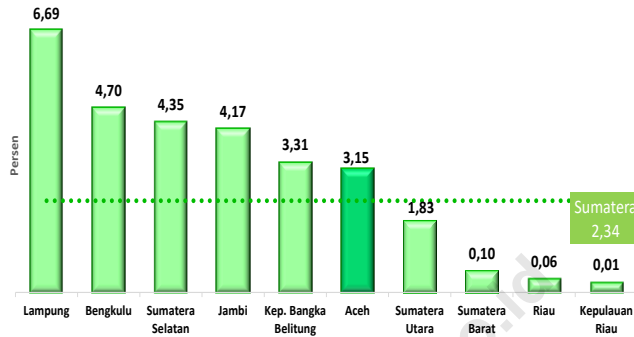
**Gambar 7. Pertumbuhan PDRB (*y-on-y*) Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2020 (Persen)**

Jika ditinjau berdasarkan kontribusi dari PDRB masing-masing provinsi di wilayah regional Sumatera terhadap PDRB total se-Sumatera, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan merupakan provinsi dengan kontribusi tertinggi yaitu masing-masing sebesar 23,35 persen, 22,53 persen, dan 13,50 persen. Ini menunjukkan bahwa hampir 60 persen dari PDRB Regional Sumatera triwulan II tahun 2021 berasal dari tiga provinsi tersebut. Kontribusi terkecil terhadap PDRB se-Sumatera adalah Provinsi Bengkulu dan Bangka Belitung yaitu berkontribusi masing-masing 2,20 persen dan 2,33 persen. Sementara itu, Aceh memberikan kontribusi sebesar 4,99 persen terhadap PDRB Sumatera pada triwulan II 2021 (Gambar 8).



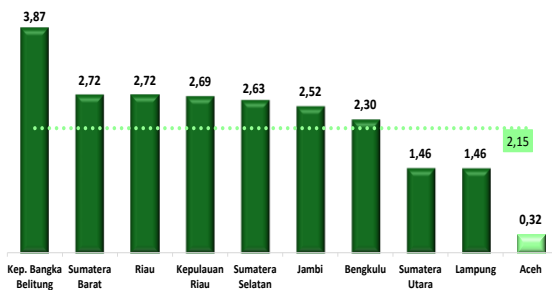
**Gambar 8. Distribusi PDRB ADHB Regional Sumatera Triwulan II tahun 2021 (Persen)**

Secara *q-to-q*, pertumbuhan ekonomi regional Sumatera mengalami pertumbuhan sebesar 2,34 persen. Jika dilihat provinsi yang berada pada regional Sumatera, Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu mencapai 6,69 persen. Pertumbuhan ekonomi paling tinggi berikutnya diikuti oleh Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Jambi masing-masing sebesar 4,70 persen, 4,35 persen dan 4,17 persen. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Aceh masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen dan 3,15 persen. Adapun provinsi lainnya mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah 2 persen (Gambar 9).



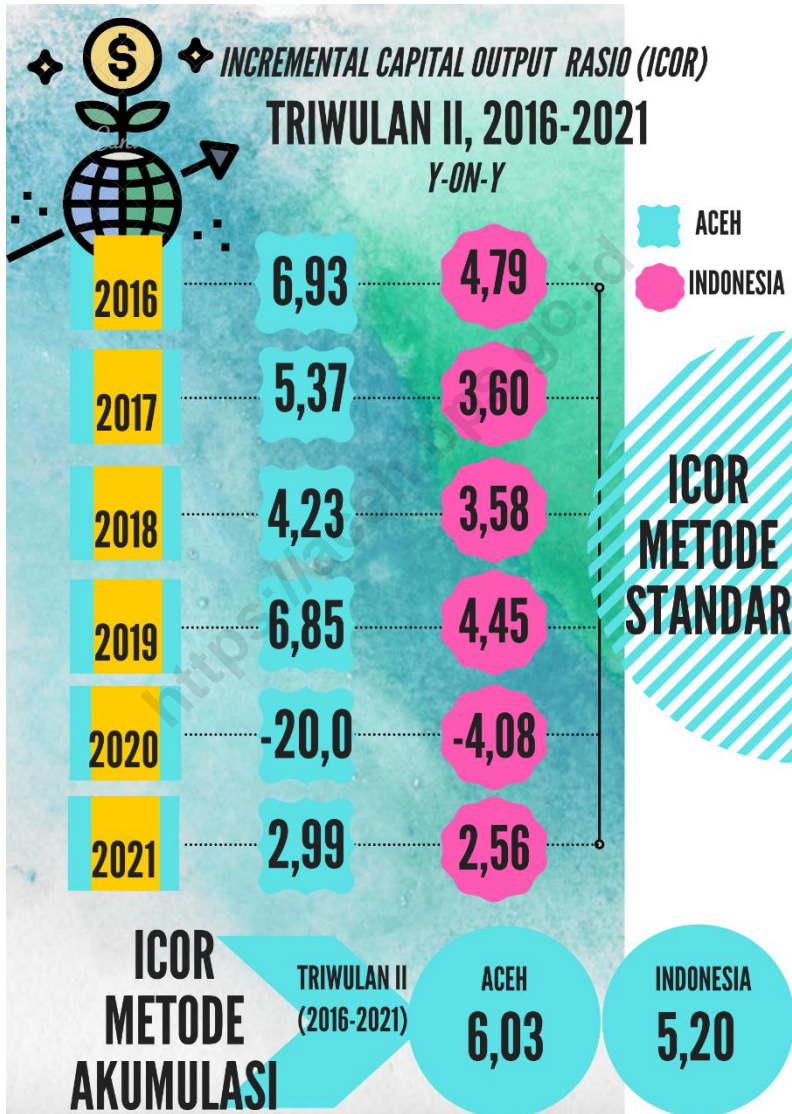
**Gambar 9. Laju Pertumbuhan PDRB *q-to-q* Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 (Persen)**

Jika dilihat secara kumulatif (*c-to-c*) pertumbuhan ekonomi regional Sumatera mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,15 persen. Provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebesar 3,87 persen. Adapun Provinsi Aceh sendiri mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 0,32 persen. Provinsi Lampung dan Sumatera Utara merupakan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,46 persen. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat dan Riau mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 2,72 persen dan merupakan pertumbuhan ekonomi yang kedua tertinggi (Gambar 10).



**Gambar 10. Laju Pertumbuhan PDRB *c-to-c* Regional Sumatera Triwulan II Tahun 2021 (Persen)**

Infografis 3.



<https://aceh.bps.go.id>

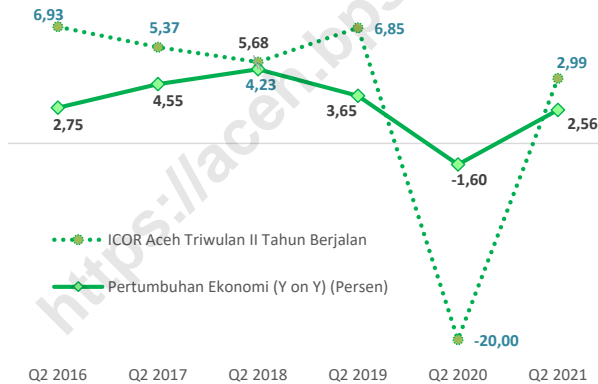
# ANALISIS ICOR

<https://dash.bps.go.id>



#### IV. ANALISIS ICOR

Koefisien *ICOR* adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output (dalam hal ini PDRB). Tinggi rendahnya *ICOR* juga mencerminkan tinggi rendahnya biaya ekonomi atas investasi agregatif. Tambahan kapital (investasi) baru ini adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Besaran *ICOR* diperoleh dengan membandingkan besarnya PMTB dengan tambahan PDRB. Nilai PMTB dan tambahan PDRB diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Aceh. Semakin tinggi nilai *ICOR*, semakin banyak investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan PDRB.



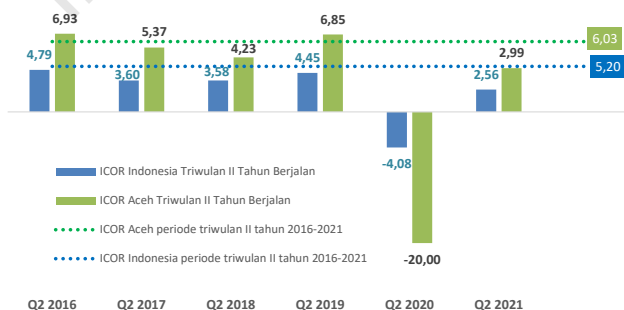
**Gambar 11. ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2016-2021**

Berdasarkan Gambar 11, dapat dilihat bahwa Besaran koefisien *ICOR* mencerminkan produktivitas PMTB yang pada akhirnya berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai, semakin kecil koefisien *ICOR* menunjukkan semakin efisien pembentukan modal yang terjadi. Koefisien *ICOR* pada triwulan II tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa hampir setiap triwulan II pada tahun berjalan diperoleh nilai koefisien *ICOR* yang positif, kecuali pada triwulan II tahun 2020 diperoleh nilai koefisien *ICOR* yang bernilai negatif. Hal ini



seperti diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan karena pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia termasuk di Provinsi Aceh sendiri. Dengan demikian, penanaman modal baru belum menghasilkan PDRB secara optimal. Namun kondisi sebaliknya pada triwulan II tahun 2021, kondisi perekonomian sudah lebih membaik dan nilai PMTB juga mengalami pertumbuhan yang positif sehingga diperoleh nilai *ICOR* sebesar 2,99. Ini berarti bahwa diperlukan 2,99 unit PMTB untuk menaikkan 1 unit PDRB.

Selama periode triwulan II tahun 2016-2021, nilai *ICOR* Provinsi Aceh baik secara akumulasi maupun triwulanan, selalu menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai *ICOR* Indonesia. Hal ini berarti bahwa efisiensi penanaman modal di Provinsi Aceh masih belum optimal dibandingkan dengan efisiensi penanaman modal di Indonesia. Secara akumulasi pada periode triwulan II tahun 2016-2021, nilai *ICOR* Provinsi Aceh adalah 6,03, yang berarti bahwa diperlukan 6,03 unit PMTB untuk menaikkan 1 unit PDRB, sementara nilai *ICOR* Indonesia adalah 5,20 persen hanya membutuhkan 5,20 unit PMTB untuk menaikkan 1 unit PDB (Gambar 12).



**Gambar 12. Perbandingan *ICOR* Aceh dan Indonesia Triwulan II Tahun 2016-2021**

# LAMPIRAN

<https://aceh.be.go.id>



Lampiran 1. **PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Triwulanan-2020 sampai Triwulan II-2021 (Triliun Rupiah)**

Komponen	Atas Dasar Harga Berlaku					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	26,52	26,41	25,97	25,52	25,34	26,52
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,91	0,93	0,95	0,89	0,86	0,86
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,23	9,79	9,70	10,58	5,36	11,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	15,26	15,07	16,19	16,82	15,81	15,76
5. Perubahan Inventori	-0,19	-0,47	0,08	0,53	0,10	-0,06
6. Ekspor Luar Negeri	1,77	1,01	1,16	1,14	1,73	1,37
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,45	0,09	0,08	0,27	0,13	0,35
8. Net Ekspor Antar Daerah	-7,68	-12,53	-11,82	-12,47	-7,37	-9,79
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>41,37</b>	<b>40,12</b>	<b>42,14</b>	<b>42,74</b>	<b>41,71</b>	<b>45,39</b>

Lampiran 2. **PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2020 sampai Triwulan II-2021 (Triliun Rupiah)**

Komponen	Atas Dasar Harga Konstan					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	18,67	18,50	18,28	17,82	17,70	18,55
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,65	0,65	0,66	0,61	0,60	0,58
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,24	5,95	5,85	6,44	3,28	6,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,92	10,78	11,53	11,92	11,09	10,97
5. Perubahan Inventori	-0,11	-0,29	0,05	0,28	0,18	-0,05
6. Ekspor Luar Negeri	1,33	0,76	0,74	0,78	1,39	0,94
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	0,27	0,07	0,06	0,20	0,07	0,19
8. Net Ekspor Antar Daerah	-1,72	-4,00	-3,64	-4,45	-2,09	-4,24
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>32,71</b>	<b>32,27</b>	<b>33,40</b>	<b>33,21</b>	<b>32,09</b>	<b>33,10</b>

## Lampiran 3.

**Laju Pertumbuhan c-to-c PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2020 sampai Triwulan II-2021 (Persen)**

Komponen	Laju Pertumbuhan C to C					
	2020				2021	
	Triw I	Triw I-II	Triw I-III	Triw I-IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3,66	1,81	0,65	-0,64	-5,20	-2,49
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-5,18	-5,46	-2,76	-3,45	-6,86	-8,81
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,91	2,38	-0,44	-8,06	1,25	6,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,97	8,27	5,86	3,75	1,59	1,72
5. Perubahan Inventori						
6. Ekspor Luar Negeri	39,12	1,99	-9,18	-14,72	4,89	11,81
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-27,30	-70,20	-82,32	-78,53	-73,73	-22,46
8. Net Ekspor Antar Daerah						
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>3,45</b>	<b>0,88</b>	<b>0,54</b>	<b>-0,37</b>	<b>-1,89</b>	<b>0,32</b>

## Lampiran 4.

**Laju Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2020 sampai Triwulan II-2021 (Persen)**

Komponen	Laju Pertumbuhan <i>Y on Y</i>					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	3,66	0,01	-1,64	-4,45	-5,20	0,25
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-5,18	-5,75	3,02	-5,62	-6,86	-10,75
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,91	0,08	-4,57	-22,02	1,25	9,99
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,97	7,58	1,60	-1,72	1,59	1,85
5. Perubahan Inventori						
6. Ekspor Luar Negeri	39,12	-30,47	-30,63	-30,09	4,89	23,91
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-27,30	-91,04	-94,65	-61,88	-73,73	179,61
8. Net Ekspor Antar Daerah						
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>3,45</b>	<b>-1,60</b>	<b>-0,10</b>	<b>-2,99</b>	<b>-1,89</b>	<b>2,56</b>

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan *q-to-q* PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Triwulanan-2020 sampai Triwulan II-2021 (Persen)

Komponen	Laju Pertumbuhan Q to Q					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	0,09	-0,92	-1,20	-2,48	-0,70	4,78
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,01	0,21	1,97	-7,65	-1,30	-3,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-60,74	83,53	-1,74	10,15	-49,02	99,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	-9,97	-1,33	7,00	3,39	-6,93	-1,08
5. Perubahan Inventori						
6. Ekspor Luar Negeri	18,59	-42,84	-2,56	5,85	77,92	-32,48
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-47,34	-74,63	-12,84	227,43	-63,72	170,05
8. Net Ekspor Antar Daerah						
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>-4,45</b>	<b>-1,33</b>	<b>3,48</b>	<b>-0,57</b>	<b>-3,37</b>	<b>3,15</b>



Lampiran 6. **Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran (2010=100) Triwulanan-2020 sampai Triwulan-II 2021**

Komponen	Indeks Implisit					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	142,06	142,75	142,10	143,21	143,15	143,02
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	140,63	143,40	143,34	145,06	143,31	148,40
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	161,36	164,65	165,89	164,32	163,35	169,36
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,78	139,86	140,46	141,13	142,49	143,58
5. Perubahan Inventori						
6. Ekspor Luar Negeri	133,23	133,47	156,67	145,53	124,70	145,98
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	165,01	129,62	126,64	136,43	180,05	179,98
8. Net Ekspor Antar Daerah						
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>126,50</b>	<b>124,31</b>	<b>126,20</b>	<b>128,71</b>	<b>129,97</b>	<b>137,15</b>

## Lampiran 7.

### Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulanan-2020 sampai Triwulan II-2021 (Persen)

Komponen	Laju Indeks Implisit					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1,39	0,49	-0,46	0,78	-0,04	-0,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,40	1,97	-0,05	1,20	-1,20	3,55
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,96	2,03	0,75	-0,94	-0,59	3,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,14	0,06	0,43	0,47	0,96	0,77
5. Perubahan Inventori						
6. Ekspor Luar Negeri	1,72	0,18	17,38	-7,11	-14,32	17,06
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,16	-21,45	-2,30	7,73	31,98	-0,04
8. Net Ekspor Antar Daerah						
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>1,11</b>	<b>-1,73</b>	<b>1,52</b>	<b>1,99</b>	<b>0,98</b>	<b>5,52</b>

Lampiran 8. **Distribusi Persentase Komponen Pengeluaran Terhadap PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Triwulanan-2020 sampai Triwulan II-2021**

Komponen	Distribusi					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	64,10	65,83	61,63	59,72	60,75	58,43
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,20	2,32	2,25	2,07	2,07	1,89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12,64	24,41	23,01	24,75	12,85	24,41
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	36,89	37,57	38,43	39,36	37,90	34,71
5. Perubahan Inventori	-0,46	-1,18	0,19	1,23	0,24	-0,13
6. Ekspor Luar Negeri	4,27	2,52	2,74	2,66	4,16	3,02
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	1,08	0,22	0,18	0,63	0,31	0,76
8. Net Ekspor Antar Daerah	-18,56	-31,24	-28,06	-29,17	-17,67	-21,57
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Lampiran 9.

**Sumber Pertumbuhan *y-on-y* PDRB Provinsi Aceh  
Menurut Pengeluaran Triwulanan-2020 sampai  
Triwulan II-2021 (Persen)**

Komponen	Sumber Pertumbuhan <i>Y on Y</i>					
	2020				2021	
	Triw I	Triw II	Triw III	Triw IV	Triw I	Triw II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	2,08	0,01	-0,91	-2,43	-2,97	0,14
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	-0,11	-0,12	0,06	-0,11	-0,14	-0,22
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,66	0,01	-0,84	-5,31	0,12	1,84
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,84	2,31	0,54	-0,61	0,53	0,62
5. Perubahan Inventori	-0,31	-0,93	0,14	0,80	0,88	0,76
6. Ekspor Luar Negeri	1,18	-1,01	-0,98	-0,98	0,20	0,56
7. Dikurangi Impor Luar Negeri	-0,32	-2,13	-3,18	-0,93	-0,61	0,38
8. Net Ekspor Antar Daerah	-3,22	-4,00	-1,29	4,72	-1,14	-0,77
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>3,45</b>	<b>-1,60</b>	<b>-0,10</b>	<b>-2,99</b>	<b>-1,89</b>	<b>2,56</b>

Lampiran 10. **Nilai PDRB ADHB, Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan II-2021**

Provinsi Regional Sumatera	PDRB ADHB Triwulan II-2021 (Triliun Rupiah)	Distribusi PDRB ADHB Triwulan II-2021 (Persen)	Laju Pertumbuhan Triwulan II-2021 (Persen)		
			q-to-q	y-on-y	c-to-c
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	45,39	4,99	3,15	2,56	0,32
Sumatera Utara	212,44	23,35	1,83	4,95	1,46
Sumatera Barat	62,11	6,83	0,10	5,76	2,72
Riau	205,03	22,53	0,06	5,13	2,72
Jambi	58,17	6,39	4,17	5,39	2,52
Sumatera Selatan	122,82	13,50	4,35	5,71	2,63
Bengkulu	19,98	2,20	4,70	6,29	2,30
Lampung	95,09	10,45	6,69	5,03	1,46
Kep. Bangka Belitung	21,19	2,33	3,31	6,85	3,87
Kepulauan Riau	67,76	7,45	0,01	6,90	2,69
<b>SUMATERA</b>	<b>909,98</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>	<b>5,27</b>	<b>2,15</b>

# *DAFTAR PUSTAKA*

<https://aceh.bps.go.id>



- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. 2020. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran 2015-2019. Banda Aceh.
- , 2021. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh 2016-2020. Banda Aceh.
- , 2021. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan I-2021. Banda Aceh.
- , 2021. PDRB Provinsi Aceh Menurut Pengeluaran Triwulan II-2020. Banda Aceh.
- Didi Nuryadin dan Jamzani Sodik. Penyusunan Indikator Ekonomi *Incremental Capital Output Ratio* 2011. 2012. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 13, Nomor 1, April 2012, hlm.83-95. Yogyakarta.
- Dornbusch, Rudiger & Fischer. 2004. Macroeconomics (9th ed). Mc Graw – Hill Companies. New York.
- Mankiw, N, Gregory. 2001. Teori Ekonomi Makro. Edisi 7. Tahun 2000. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nopirin. 2000. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses. Masalah dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, Tison Arif. 2011. Pengaruh efisiensi perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi 32 provinsi di indonesia. Jurnal skripsi.
- European Communities, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, United Nations and World Bank. 2009.SNA 2008. New York.



# DATA

**MENCERDASKAN BANGSA**



**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 50 Banda Aceh

Telp. (0651) 23005 Fax. (0651) 33632

<http://www.aceh.bps.go.id> Email: [bps1100@bps.go.id](mailto:bps1100@bps.go.id)



9 772502 088008